



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung BAPPEDA-Brida Lt. 4
TENGGARONG

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta menggambarkan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sepanjang tahun 2025, BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, serta inovasi daerah guna mendukung pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan strategis daerah. Berbagai capaian kinerja yang diperoleh merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran, serta dukungan dari para pemangku kepentingan.

Namun demikian, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, melalui LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas kinerja BRIDA di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

Tenggarong, 5 Februari 2025
Kepala Brida Kab. Kutai Kartanegara



Maman Setiawan, S.T, M. T
19701005 199903 1 011

DAFTAR ISI

Hal:

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	6
C. Aspek Strategis	7
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	10
F. Struktur Organisasi.....	10
G. Sarana dan Prasarana (Aset)	25
BAB II : RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis	28
B. Visi Kepala Daerah	29
C. Misi Kepala Daerah.....	30
D. Tujuan dan Sasaran	32
E. Rencana Kerja	37
F. Target Indikator Kinerja Utama	47
G. Perjanjian Kinerja.....	48
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Capaian Kinerja.....	55
B. Realisasi Anggaran.....	80
BAB IV : P E N U T U P.....	83

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi SAKIP yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. LKjIP tidak hanya menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, tetapi juga menjadi alat evaluasi atas efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin kompleks dan dinamis, keberadaan BRIDA diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), mendorong inovasi daerah, serta memperkuat daya saing dan kemandirian daerah.

Tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, karena berada dalam fase lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta penguatan peran daerah sebagai wilayah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis riset. Oleh karena itu, kinerja BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi semakin krusial dalam menyediakan kajian, riset, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Penyusunan LKjIP BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BRIDA, Perjanjian Kinerja, serta keterkaitannya dengan sasaran dan indikator kinerja pembangunan daerah. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Kutai Kartanegara, LKjIP BRIDA Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana evaluasi internal untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode selanjutnya, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta penguatan integrasi antar dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

LKjIP ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui penyajian informasi kinerja yang terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, LKjIP BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi. Kegiatan Riset dan Inovasi Daerah berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bertujuan melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Kajian, Studi Kelayakan, Studi Komperatif dan melakukan inovasi-inovasi terbaru yang diharapkan rekomendasi yang dihasilkan mampu menjadi salah satu bahan pertimbangan Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan serta rekomendasi yang dihasilkan mampu dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan perjanjian dan penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata dan komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam penjelasan Peraturan Menteri Pendayaaan Gunaan Aparatur Negara tersebut dirumuskan bahwa azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah, sehingga dapat di ketahui keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan atau kendala yang di alami. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 sebagai wahana pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2025. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, lengkap dan terukur mengenai pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun anggaran yang di mulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 thun 2022 tentang Tatakelola Riset dan Inovasi di daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.
10. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan susunan struktur organisasi.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. ASPEK STRATEGIS

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 2021 – 2026 atau selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas riset dan inovasi daerah dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan Daerah dan Pengkajian Peraturan;
2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas riset dan inovasi daerah dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas riset dan inovasi daerah dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Inovasi Daerah;
4. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas riset dan inovasi daerah dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Sosial Budaya, dan Kemasyarakatan;
5. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penghimpunan, pengolahan, menganalisis, dan penyajian data, informasi, serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perumusan kebijakan daerah dan inovasi daerah;
6. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya internal, sebagai Regulator, Fasilitator dan Motivator dalam pemberdayaan Inovasi daerah untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/ satuan kerja.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kegiatan Riset dan Inovasi Daerah merupakan salah satu inti dari pembangunan daerah yang diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan berdasarkan kajian akademis kepada Pemerintah Daerah untuk menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sehingga kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah sudah mempertimbangkan berbagai aspek.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan Teknologi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah dan hal ini dipertegas dengan Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tahun 2022 tentang Tatakelola Riset dan Inovasi di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2022 namun karena aturan turunannya berupa Peraturan Bupati belum terbit maka SOTK masih mengadopsi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.

1. Kedudukan

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Riset (Penelitian dan Pengembangan Daerah) dan Inovasi Daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. **Perumusan kebijakan teknis** di bidang riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi daerah, sebagai bahan penetapan kebijakan pembangunan daerah oleh kepala daerah;
2. **Penyusunan perencanaan dan program kerja** di bidang riset dan inovasi daerah, yang selaras dengan RPJMD, Renstra perangkat daerah, serta kebijakan riset dan inovasi nasional;
3. **Pelaksanaan kegiatan riset, pengembangan, dan pengkajian** yang mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. **Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan inovasi daerah**, termasuk pembinaan dan pendampingan perangkat daerah dalam pengembangan dan penerapan inovasi;
5. **Pengelolaan, pemanfaatan, dan diseminasi hasil riset dan inovasi daerah** agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan dan program pembangunan;
6. **Penguatan jejaring dan kemitraan riset dan inovasi**, melalui kerja sama dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
7. **Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah**, guna memastikan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
8. **Pelaksanaan fungsi kesekretariatan**, yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pelaporan kinerja BRIDA.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara permasalahan utama terdiri dari ;

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Brida Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjumlah 101 orang terdiri atas ASN 69 orang dan PPPK 32 orang. Dengan komposisi 1 orang ASN Peneliti Ahli Madya, 3 orang ASN Penyetaraan Fungsional Peneliti Ahli Muda , 1 orang Peneliti Ahli Pertama. Untuk Perencana Hanya 1 orang penyetaraan yaitu sebagai fungsional Perencana Ahli Muda. selebihnya ASN dan PPPK sebagai Jabatan Pelaksana , menjadi factor utama kurang maksimalnya kinerja Brida, sementara dibutuhkan tambahan Peneliti Fungsional sebanyak 17 orang Fungsional Peneliti lagi, adapun yang dibutuhkan adalah Peneliti Ahli Utama 1 orang, Peneliti Ahli Madya 5 orang dan Peneliti Ahli Muda 11 orang. Sesuai bidang teknis Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 thun 2022 tentang Tatakelola Riset dan Inovasi di daerah, kurangnya fasilitasi Diklat Fungsional Peneliti.
- 2) Belum punya Sarana dan Prasarana yang memadai, Saat ini Brida Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki gedung sendiri dan masih menumpang pada Gedung Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, belum Memiliki UPTD dan Laboratorium serta Lahan Demplot.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahkan damn Mengkoodinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- d. Bidang Sosial dan Kependudukan
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- h. UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Adapun fungsi riset atau kelitbangan terdiri ;

- a. Kelitbangan Utama
- b. Kelitbangan Pendukung

Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan;
- c. Pemantauan;
- d. Evaluasi dan;
- e. Pelaporan;

Paragraf Kesatu (Kelitbangan Utama); Pasal 4

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi;

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Perekayasaan;
- d. Penerapan;
- e. Inovasi;
- f. Inovasi; dan
- g. Evaluasi Kebijakan;

Peragraf ke dua (Kelitbangan Pendukung);

- a. Peningkatan kapasitas;
- b. Penguatan Ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- g. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya;

Peragraf ke dua (Kelitbangan Pendukung);

- h. Peningkatan kapasitas;
- i. Penguatan Ketatalaksanaan;
- j. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- k. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- l. Fasilitasi inovasi daerah;
- m. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- n. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya;

Kegiatan Teknologi adalah pentahapan kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi yang secara runtun meliputi :

- a. Penelitian adalah Mencari informasi, data atau keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis yang berkaitan dengan subjek ilmu pengetahuan & teknologi;
- b. Pengkajian adalah Penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang dilakukan dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah;
- c. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru yang terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah;
- d. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah;
- e. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam

kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;

f. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

g. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau social :

▢ Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan Pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan social.

▢ Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

▢ Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan public yang merupakan gagasan/Ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

▢ Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu system untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia usaha dan masyarakat daerah.

h. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah;

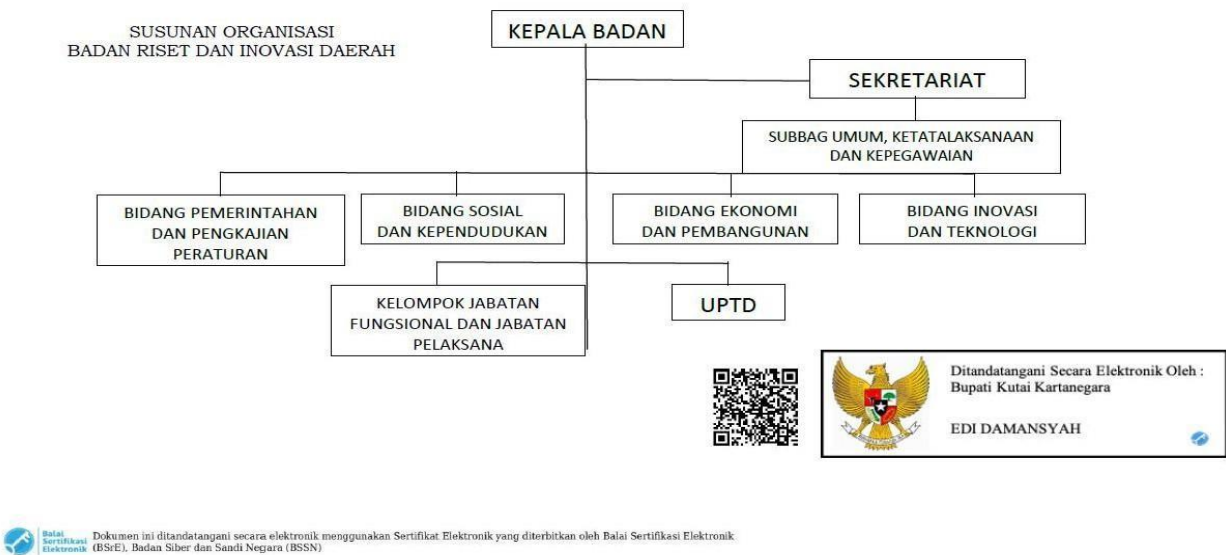
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan;
 - 1) Kewenangan yang dimiliki oleh badan.
 - 2) Kebutuhan Daerah.
 - 3) Kemampuan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana.
 - Kriteria umum Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 1) Telah terbentuk Badan yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 2) Tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan umum / teknis dan perizinan.
 - 3) Menghasilkan barang / jasa yang diperlukan bagi Badan atau masyarakat dan melayani langsung kedudukan masyarakat atau unit organisasi tertentu.
 - 4) Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan yang didukung oleh tenaga fungsional atau keahlian / keterampilan tertentu.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
 - Kriteria Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
 - 1) Memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan.
 - 2) Memiliki fasilitas pengembangan, mencakup laboratorium, Demplot, kebun, kolam, sawah percobaan atau sarana yang sejenis.
 - 3) Menunjukkan hasil pengembangan dalam satu tahun anggaran terakhir.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dimungkinkan untuk dibentuk apabila tingkat volume pekerjaan penelitian dan pengembangan cukup tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TANGGAL 16 JANUARI 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH



Gambar. 3.1 Struktur Organisasi BRIDA Kab. Kutai Kartanegara

A. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 didukung oleh 105 (Seratus lima) orang Pegawai yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) Aparatur Sipil Negara (ASN) , 32 (tiga puluh dua) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas (THL) untuk mendukung kinerja Brida. Di tahun 2025 ini tidak ada ASN yang pensiun, namun tenaga PPPK yang sebelumnya berstatus THL (Tenaga Harian Lepas) berjumlah 34 orang setelah beralih status menjadi PPPK berkurang menjadi 32 orang karena ada 5 orang yang SK (Surat Keputusan) nya keluar di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain, hal ini disebabkan tidak ada formasinya di Brida ini , namun ada tenaga PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) setelah dilantik yang masuk lagi ke Brida sebanyak 5 orang.

Berikut ini adalah data Kelembagaan dan data Kepegawaian per November Tahun 2025 yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Kartanegara yang bersumber dari bagian Kepegawaian Brida.

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	TIPE OPD	JUMLAH PNS KEADAAN PER NOPEMBER 2025								
			JABATAN PIMPINAN TINGGI		JABATAN ADMINISTRASI			JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	JABATAN PELAKSANA (JP)	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	JUMLAH
			Madya	Pratama	Adminis- trator	Pengawas	Pelaksana				
			Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Es. V				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Seluruhnya		-	1	5	1	-	6	56	32	101
1	Kepala Badan			1							1
2	Sekretaris Badan				1						1
3	Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian					1					1
4	Arsiparis Ahli Pertama										-
5	Arsiparis Penyelia										-
6	Arsiparis Mahir										-
7	Arsiparis Terampil										-
8	Penelaah Teknis Kebijakan								1		1
9	Penata Layanan Operasional									7	7
10	Pengelola Layanan Operasional										-
11	Pengolah Data dan Informasi								7		7
12	Pengadministrasi Perkantoran								5	3	8
13	Perencana Ahli Muda							1			1
14	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda										-
15	Perencana Ahli Pertama										-
16	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama										-
17	Peneliti Ahli Pertama										-
18	Penelaah Teknis Kebijakan								5		5
19	Penata Layanan Operasional									3	3
20	Pengelola Layanan Operasional										-
21	Pengolah Data dan Informasi								2		2
22	Pengadministrasi Perkantoran										-
23	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				1						1
24	Analisis Kebijakan Ahli Muda										-
25	Peneliti Ahli Muda										-
26	Peneliti Ahli Pertama							1			1
27	Analisis Kebijakan Ahli Pertama										-
28	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi								1		1
29	Penata Kelola Pemerintahan								1		1
30	Penata Layanan Operasional									2	2
31	Penelaah Teknis Kebijakan										-

32	Pengelola Layanan Operasional									-
33	Pengolah Data dan Informasi							4		4
34	Pengadministrasi Perkantoran							4	2	6
35	Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan				1					1
36	Peneliti Ahli Muda						1			1
37	Psikolog Klinis Ahli Muda									-
38	Peneliti Ahli Pertama									-
39	Analisis Kebijakan Ahli Pertama									-
40	Psikolog Klinis Ahli Pertama									-
41	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi							2		2
42	Penelaah Teknis Kebijakan							1		1
43	Penata Layanan Operasional								2	2
44	Pengelola Layanan Operasional									-
45	Pengolah Data dan Informasi							6		6
46	Pengadministrasi Perkantoran							4	1	5
47	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan				1					1
48	Peneliti Ahli Muda						1			1
49	Peneliti Ahli Pertama									-
50	Analisis Kebijakan Ahli Pertama									-
51	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi							1		1
52	Penelaah Teknis Kebijakan							3		3
53	Penata Layanan Operasional								6	6
54	Pengelola Layanan Operasional									-
55	Pengolah Data dan Informasi							2		2
56	Pengadministrasi Perkantoran								3	3
57	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi				1					1
58	Analisis Kebijakan Ahli Muda									-
59	Peneliti Ahli Muda						1			1
60	Peneliti Ahli Pertama									-
61	Analisis Kebijakan Ahli Pertama									-
62	Penelaah Teknis Kebijakan							3		3
63	Penata Layanan Operasional								1	1
64	Pengelola Layanan Operasional									-
65	Pengolah Data dan Informasi							1		1
66	Pengadministrasi Perkantoran							3	2	5
67	Peneliti Ahli Utama									-
68	Peneliti Ahli Madya						1			1
69	Analisis Kebijakan Ahli Madya									-
70	Perencana Ahli Madya									-

NO	NAMA JFT	BEZETTING							KEBUTUHAN		
		UTAMA	MADYA	MUDA	PERTAMA	PENYELIA	MAHIR	TERAMPIL	UTAMA	MADYA	MUDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peneliti Ahli Utama								1		
2	Peneliti Ahli Madya		1							5	
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya									2	
4	Perencana Ahli Madya									1	
5	Peneliti Ahli Muda			3							11
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda										2
7	Perencana Ahli Muda			1							1
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda										1
9	Psikolog Klinis Ahli Muda										1
10	Peneliti Ahli Pertama				1						
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama										
12	Perencana Ahli Pertama										
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama										
14	Psikolog Klinis Ahli Pertama										
15	Arsiparis Ahli Pertama										
16	Arsiparis Penyelia										
17	Arsiparis Mahir										
18	Arsiparis Terampil										

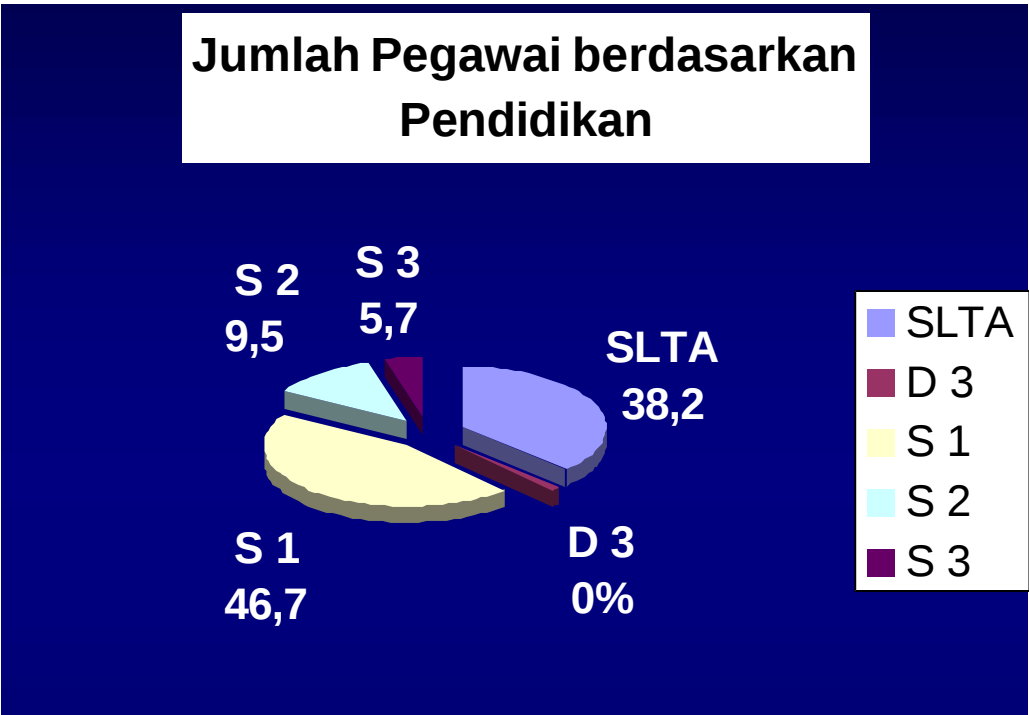
1. Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Sesuai dengan Tingkat Pendidikan :

Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tingkat pendidikannya diuraikan sebagaimana Tabel 2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

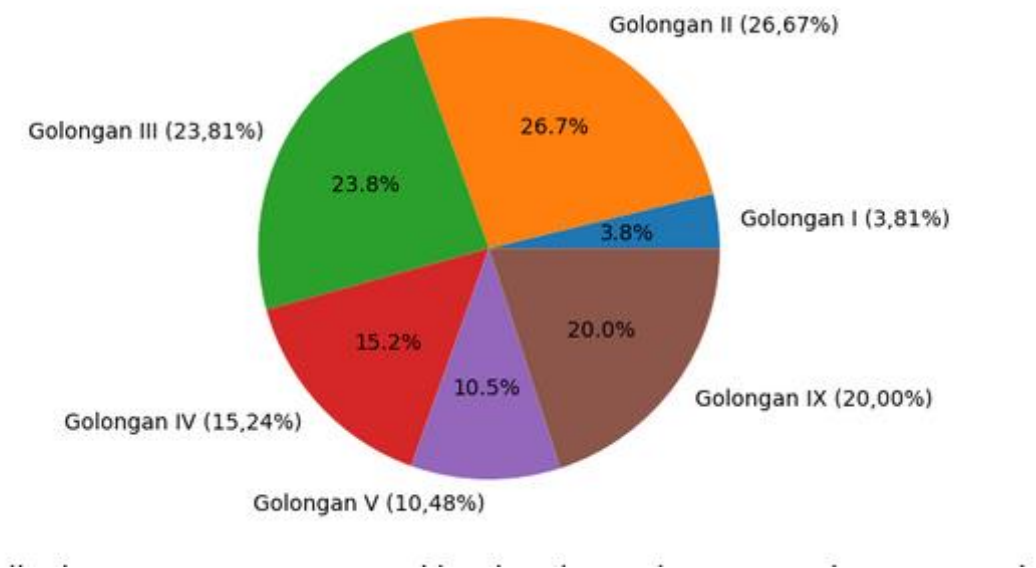
No	Uraian	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	JLH
1	Kepala					1		1
2	Sekretariat		11		7	4		22
3	Bidang Pemerintahan Peraturan Pengkajian		6		3	1	1	11
4	Bidang Sosial dan Kependudukan		6		6		2	14
5	Bidang Ekonomi dan Pembangunan		2		3	1	1	7
6	Bidang Inovasi dan Teknologi		3		3	2		8
7	Jabatan Fungsional Tertentu		1		2	1	2	6
8	PPPK		11		21			32
9	Tenaga Harian Lepas				4			4
	Total	0	40		49	10	6	105



Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Uraian	Golongan						JLH
		I	II	III	IV	V	IX	
1	Kepala				1			1
2	Sekretariat		11	7	4	3	10	35
3	Bidang Pemerintahan Peraturan Dan Pengkajian		6	3	2	2	2	15
4	Bidang Sosial dan Kependudukan		6	6	2	1	2	17
5	Bidang Ekonomi dan Pembangunan		2	3	2	3	6	16
6	Bidang Inovasi dan Teknologi		3	3	2	2	1	11
7	Jabatan Fungsional Tertentu			3	3			6
8	Tenaga Harian Lepas	4						4
	Total	4	28	25	16	11	21	105

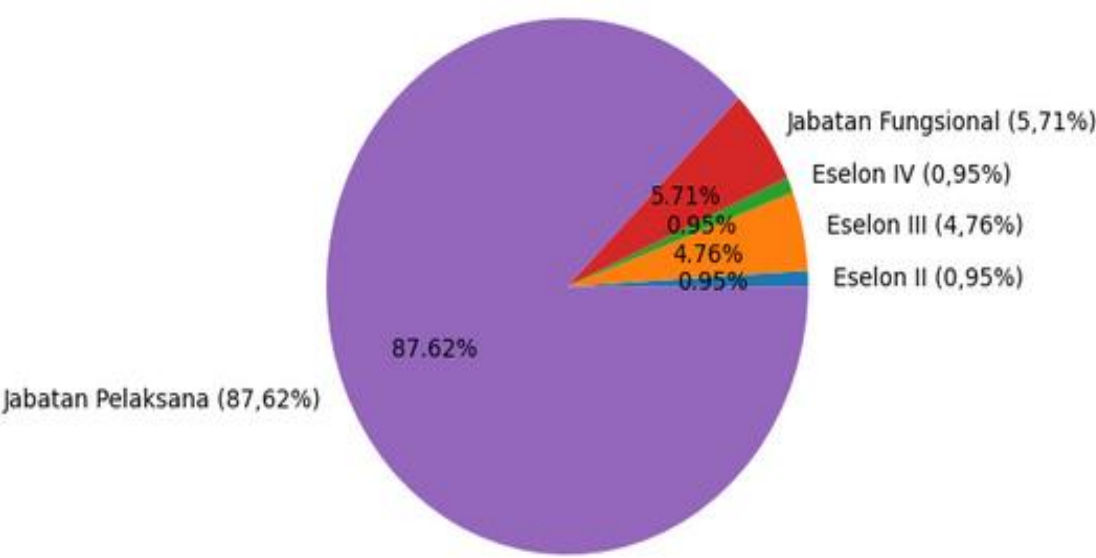
Diagram Lingkaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan (Total 105 Pegawai)



Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Eselon			JF	JP	JLH
		II	III	IV			
1	Kepala	1					1
2	Sekretariat		1	1	1	34	37
3	Bidang Pemerintahan Peraturan dan Pengkajian		1		2	13	16
4	Bidang Sosial dan Kependudukan		1		1	16	18
5	Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1		1	15	17
6	Bidang Inovasi dan Teknologi		1		1	10	12
7	Tenaga Harian Lepas					4	4
	Total	1	5	1	6	92	105

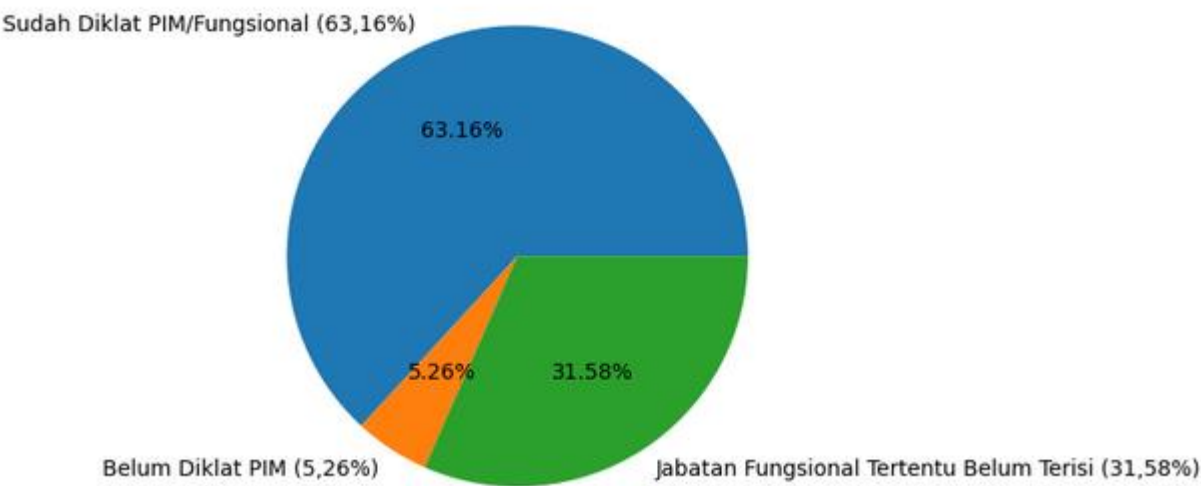
Diagram Lingkaran Komposisi Pegawai (Total 105 Orang)



Jumlah Pejabat yang telah melaksanakan Diklatpim

No	Uraian	Pejabat Memenuhi Syarat Diklatpim / Diklat fungsional	Jumlah Jabatan Yang Ada
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	2	2
3	Bidang Pemerintahan Peraturan dan Pengkajian	1	1
4	Bidang Sosial dan Kependudukan	1	1
5	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	1
6	Bidang Inovasi dan Teknologi	-	1
7	Jabatan Fungsional Tertentu	6	12

Diagram Lingkaran Status Jabatan dan Diklat (Total 19 Jabatan)



No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat	Keterangan
1.	Kepala	Kepala Badan	Maman Setiawan, ST.,MT.	
2.	Sekretariat	Sekretaris	H. Pahmiadi, SE., M.Si.	
3.		Kepala Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Astuti, S.Sos	
4.		Perencana Ahli Muda	H. Zainur Rahman, SE.	
5.	Bidang Pemerintahan dan Peraturan Pengkajian	Kepala Bidang Pemerintahan dan Peraturan Pengkajian	Dr. Aini, S.Sos, M.Si	
6.		Peneliti Ahli Madya	Dr.H.M. Sholeh Pulungan, S.Pd, M.H	
7.		Peneliti Ahli Pertama	Wahyuni, SE	
8.	Bidang Sosial dan Kependudukan	Kepala Bidang Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Dr. Tulus Sutopo, S.Pd.,MM.Pd	
9.		Peneliti Ahli Muda	Dr. Joko Saptohadi, S.E., M.Si.	
10.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	DR. Karno, SP.,MM	
11.		Peneliti Ahli Muda	Agus Wardiansyah, SPD.MPh.	
12.	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kapala Bidang Inovasi Daerah	Murdianto, S.STP.,MSi.	
13.		Peneliti Ahli Muda	H. Masriel Yunanda, S.H.	
	Jumlah	13	13	

Daftar ASN, PPPK dan THL Mutasi, Pindah, Meninggal dan Pensiun di tahun 2025

N o	Uraian	Data Awal	Masuk	Mutasi /Penyeta raan	Naik Pangkat/ Gol	Pensiun	Wafat	Jumlah
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	36						26
3	Bidang Pemerintahan Peraturan dan Pengkajian	12	2					10
4	Bidang Sosial dan Kependudukan	17			2			16
5	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12	4		1			8
6	Bidang Inovasi dan Teknologi	10	1		1			6
7	Jabatan Fungsional Tertentu	6						3
8	Tenaga Harian Lepas	4						4
	Jumlah	98	7					104

Daftar ASN Brida yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama tahun 2025;

No	Nama Diklat	Lama Diklat	Target Peserta	Tempat Diklat	Nara Sumber	Realisasi Peserta
1.	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran	46 Jam	2 ASN	BPSDM Prov. Kaltim	Bappenas	2 ASN
2.	Manajemen Risiko	8JP	20 ASN	Hotel Yello	BPKP Prov. Kaltim	25 ASN
3.	Pelatihan Data Kualitatif dan Kuantitatif untuk Riset dan Kebijakan tahun 2025	40 JP	5 ASN	BPSDM Prov. Kaltim	- Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman - BRIN Prov. Kaltim -BKPSDM Prov. Kaltim	5 ASN

G. SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Pada tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan kebutuhan Barang untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor adalah sebagai berikut :

Untuk kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang diperlukan masih sangat dibutuhkan dikarenakan ada dari perlengkapan dan Peralatan yang tidak bisa dioptimalkan lagi.

Pada tahun 2025 Brida Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset Peralatan dan mesin sesuai dengan KIB B sebagai berikut :

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	11.273.238.009,40	1.026 unit
2	Barang Inventaris Rusak Berat	470.535.008,00	86 unit
3	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	0 unit
	Total Barang Inventaris	11.743.773.017,40	1.113 unit

Pada tahun 2025 Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset Instasi dan Jaringan sesuai dengan KIB D sebagai berikut :

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	214.670.000,00	2 unit
2	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	0 unit
	Total Barang Inventaris	214.670.000,00	2 unit

Pada tahun 2025 Brida Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aset Bahan Perpustakaan sesuai dengan KIB E sebagai berikut :

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	169.279.000,-	1.007 buku
2	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	0 buku
	Total Buku Inventaris	169.279.000,-	1.007 buku

Matrik Perbandingan Tindak Lanjut Rekonsiliasi Aset
Rekonsiliasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B

Rekonsiliasi 2024				Rekonsiliasi 2025			
NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item	NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	11.233056.009,40	985 unit	1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	11.273.238.009,40	986 unit
2	Barang Inventaris Rusak Berat	470.535.008,00	86 unit	2	Barang Inventaris Rusak Berat	470.535.008,00	86 unit
3	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	0 unit	3	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	0 unit
	Total Barang Inventaris	11.703.591.017,40	1.071 unit		Total Barang Inventaris	11.743.773.017,40	1.113 unit

Matrik Perbandingan Tindak Lanjut Rekonsiliasi Aset
Rekonsiliasi Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB) C

Rekonsiliasi 2024				Rekonsiliasi 2025			
NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item	NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris Gedung dan Bangunan	0	-	1	Barang Inventaris Gedung dan Bangunan	363.764.957,00	1 unit

Rekonsiliasi Kartu Inventaris Barang Jaringan Telpn (KIP) D

Rekonsiliasi 2024				Rekonsiliasi 2025			
NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item	NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	214.670.000,-	1unit	1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	214.670.000,-	2 unit
2	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	1unit	2	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	0 unit

	Total Barang Inventaris	214.670.000,00	1 unit		Total Barang Inventaris	214.670.000,00	2 unit
--	-------------------------	----------------	--------	--	-------------------------	----------------	--------

Rekonsiliasi Kartu Inventaris Barang Bahan Perpustakaan (KIP) E

Rekonsiliasi 2024				Rekonsiliasi 2025			
NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item	NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	169.279.000,-	1.007 buku	1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	169.279.000,-	1.007 buku
2	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	346 buku	2	Barang Inventaris tidak ditemukan	0	346 buku
	Total Barang Inventaris	169.279.000,-	1.353 buku		Total Barang Inventaris	169.279.000,-	1.353 buku

Rekonsiliasi Kartu Inventaris Barang Softwear/Website (KIB) L

Rekonsiliasi 2024				Rekonsiliasi 2025			
NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item	NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	55.600.000,-	1 unit	1	Barang Inventaris baik dan Rusak Ringan	55.600.000,-	5 Unit
2	Barang Inventaris tidak ditemukan	31.000.000,00	1 unit	2	Barang Inventaris tidak ditemukan	31.000.000,00	1 unit
	Total Barang Inventaris	55.600.000,00	1 unit		Total Barang Inventaris	55.600.000,00	5 unit

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2025 mempergunakan semua aset sesuai dengan peruntukannya atau penetapan statusnya dan tetap melakukan penelusuran atas Barang inventaris yang tidak ditemukan serta berupaya mengajukan Penghapusan atas Aset yang Rusak berat.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyusunan ini mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sehingga menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang riset (Penelitian dan Pengembangan) dan inovasi daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Renstra Brida 2021 - 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah selama priode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Iptek dalam mewujudkan Visi, Misi Pembangunan dan Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Namun di tahun 2025 merupakan periode strategis bagi Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandai dengan terjadinya pergantian kepala daerah sebagai hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta dimulainya tahapan transisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pergantian kepala daerah membawa konsekuensi terhadap perubahan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD periode baru yaitu tahun 2025-2029.

Perubahan politik dan kepemimpinan daerah pada Tahun 2025 juga menuntut BRIDA untuk menyesuaikan rencana strategisnya agar tetap relevan dan responsif. Penyesuaian Renstra BRIDA dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD terbaru, kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Transisi RPJMD dan pergantian kepala daerah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BRIDA untuk memperkuat perannya dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis riset, inovasi, dan data. Melalui Renstra yang adaptif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru, BRIDA diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. VISI KEPALA DAERAH

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara konseptual Visi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka menunjang Pemerintahan Daerah di bidang Riset dan Inovasi, maka ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mewujudkan “ **Kutai Kartanegara Inovatif, Daya Saing dan Mandiri** “ Pernyataan Visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Badan Riset dan Inovasi Daerah mendukung dalam merumuskan hasil akhir Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Visi Kepala daerah baru yang sudah ditetapkan tidak dimaknai sebagai keputusan kebijakan, melainkan sebagai penyempurnaan dan akselerasi pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi capaian periode sebelumnya dan dinamika lingkungan strategis.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 adalah “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Visi ini dikenal dengan sebutan “**Kukar Idaman Terbaik**”, yang mencerminkan arah pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lima tahun ke depan.

C. MISI KEPALA DAERAH

Adapun Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Adalah “ **Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia** ” yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri dari :

- Misi 1 : Memantapkan Birokrasi untuk yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.
- Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
- Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
- Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Simbar Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Kontribusi Brista dalam pelaksanaan misi Kepala Daerah dengan berperan aktif mendukung dan mensukseskan program-program pembangunan tersebut. adapun Misi Kepala Daerah selama kurun waktu Tahun 2021– 2026 dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah dan Pengkajian Peraturan ;
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan ;
3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah ;

4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Inovasi Daerah ;
5. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, informasi serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perumusan kebijakan daerah;
6. Melaksanakan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/ satuan kerja.

Program-program berikut yang dilaksanakan Bripda Kab. Kutai Kartanegara dalam mendukung Misi Bupati Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 juga sama dengan program sebelumnya . Adapun **Misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029** adalah:

1. **Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar** pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses dan kualitas layanan yang layak dan merata.
2. **Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif** sebagai pondasi ekonomi baru yang non-ekstraktif dan berdaya saing tinggi.
3. **Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** dengan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur, birokrasi yang bersih, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. **Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan** berbasis kearifan lokal, sehingga pembangunan daerah berjalan berkesinambungan dan lestari.
5. **Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan**, memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ruang.

D. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun **Tujuan** Jangka Menengah pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 adalah “ **Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah** “ sedangkan Indikator Tujuan Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “ **Persentasi Rekomendasi yang Termanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan sebagai salah satu Bahan Penyusunan Kebijakan Daerah** “.

Tujuan yang ingin dicapai Brista pada tahun 2025 tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Misi RPJMD 2021-2026	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang Termanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan sebagai salah satu bahan Penyusunan Kebijakan		Persen	n.a	28.6	100	100	100	100	100
		Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Dokumen		1	1	1	1	1	1
		Meningkatkan pembangunan Sumber daya Manusia yang berakhlak mulia, Unggul dan Berbudaya	Dokumen		1	2	2	2	2	2
		Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen		1	2	3	3	2	2

Tujuan	Indikator Tujuan	Misi RPJMD 2021-2026	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah	Dokumen			2	2	2	2	1
		Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bewawasan lingkungan	Dokumen		1	2	2	2	2	2
			Jumlah		5	9	10	10	9	8

Adapun **Sasaran** Jangka Menengah pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 adalah “ **Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah** “ dengan **Indikator Sasaran** Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah :

1. **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**
2. **Indeks Inovasi Daerah**

Untuk mengetahui gambaran dari target Sasaran selama kurun waktu 2021 -2026 dapat dilihat pada table sebagai berikut

Sasaran	Indikator Sasaran	Misi penunjang RPJMD 2021-2026	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		Persen	n.a	28.6	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan	• Fasilitasi pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan		1	3	3	1	1	1

Sasaran	Indikator Sasaran	Misi penunjang RPJMD 2021-2026	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	• Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan • Penelitian dan Pengembangan Periwisata • Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen		1	4	4	4	4	4
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	• Penelitian dan Pengembangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Penelitian dan Pengembangan bidang Perindustrian dan Perdagangan • Penelitian dan Pengembangan bidang Badan Usaha Milik Daerah • Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan • Penelitian dan Pengembangan bidang Lingkungan Hidup	Dokumen		1	2	5	4	3	3

Sasaran	Indikator Sasaran	Misi penunjang RPJMD 2021-2026	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		• Penelitian dan Pengembangan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
	Pengembangan Teknologi dan Inovasi	• Penelitian dan Pengembangan bidang Tehnologi dan Inovasi • Desiminasi Jenis, Prosedur dan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat Inovatif • Sosialisasi dan Desiminasi hasil-hasil kelitbangan • Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen		1	3	3	3	3	3
			Jumlah		5	15	22	18	15	14
	Indeks Inovasi Daerah		Skor Indeks	34.64	41.38	44.70	47.12	49.57	52.56	55.01
		• Pekan Inovasi Daerah tingkat Regional dan Nasional • Inovative Government Award (IGA) tingkat Nasional • Pepes Ikan Peda Inovasi Tingkat Provinsi Kalimantan timur • 6 Policy Brief serta Laporan Evaluasi Inovasi Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1

E. RENCANA KINERJA

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 yang dituangkan pada Rencana Kerja (renja) tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2025 memprioritaskan Sub kegiatan dalam menunjang pencapaian output, outcome dan impact, gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

No.	Sasaran Renstra	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Alasan Pemilihan	PENJELASAN INDIKATOR			Unit Penanggung Jawab
						Cara Perhitungan		Sumber Data	
1.	Meningkatnya kinerja kelitbangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	Merupakan tugas dan fungsi dari Brida	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	X 100	Permendagri No. 86 Tahun 2017	BRIDA
2	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan Dalam Penguatan Inovasi	2.	Indeks inovasi daerah	52,56	Merupakan tugas dan fungsi dari Brida	<u>Skor Total</u> Skor Total Maksimal (250)	X 100	Badan Startegi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri	BRIDA

2. Program

Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 terdiri dari 2 Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 12.741.776.127,-
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp. 5.215.569.972,-

Total anggaran setelah perubahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 sebesar Rp. **17.957.346.099,-**

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran Perubahan Rp. 12.741.776.127,- dengan Uraian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah** Rp. 441.328.292,- jumlah target 11 Dokumen terdiri atas ;
 - a) Uraian Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 307.034.100,- target 3 Dokumen ;
 - b) Uraian Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 24.185.800,- target 8 Laporan ;
 - c) Uraian Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 64.735.100,- target 1 Laporan;
 - d) Uraian Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Rp. 23.764.880, - , target 1 Dokumen;
 - e) Uraian Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 21.608.412,-, target 1 Berita Acara;
- 2) **Sub Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah** Rp. 9.690.980.123,- jumlah target 7 Dokumen terdiri dari ;
 - a) Uraian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.840.895.525,- , target 1.090 org/bln;
 - b) Uraian Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun Rp. 14.853.400,- target 2 laporan
 - c) Uraian Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester Rp. 144.693.000,- target 4 laporan;
 - d) Uraian Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp. 14.424.920,-, target 1 Dokumen;
- 3) **Sub Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah** Rp. 63.881.800,- jumlah target 7 Dokumen terdiri dari :
 - a) Uraian Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp. 21.520.000,- target 1 Dokumen ;
 - b) Uraian Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Rp. 33.626.800,- target 1 Laporan ;

- c) Uraian Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 8.735.000,- target 6 laporan;
- 4) **SubKegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** Rp. 80.011.420,- jumlah target 6 dokumen terdiri dari ;
 - a) Uraian Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi Rp. 47.111.000,- target 10 orang ;
 - b) Uraian Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp. 32.900.420 ,- target 5 orang;
- 5) **Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** Rp. 327.571.508,- jumlah target 7 pelayanan terdiri dari :
 - a) Uraian Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 68.248.300,- target 3 paket/jenis/unit ;
 - b) Uraian Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 97.548.503,- target 2 paket/jenis ;
 - c) Uraian Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Rp. 13.080.930,- target 2 paket ;
 - d) Uraian Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material Rp. 33.962.575,- target 1 paket pameran ;
 - e) Uraian Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 69.147.400,- target 48 laporan ;
 - f) Uraian Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD Rp. 25.371.600,- target 37 dokumen ;
 - g) Uraian Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan system Pemerintahan berbasis elektronik Rp. 20.212.200,- target 1 dokumen;
- 6) **Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Rp. 287.750.000,- jumlah target 1 unit terdiri dari :
 - a) Uraian Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, target Rp. 85.455.040,-
- 7) **Sub Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** Rp. 419.533.222,- dengan target 12 bulan :
 - a) Uraian Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 58.887.991,- target 12 laporan ;

- b) Uraian Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
Rp. 360.645.231,- , target 12 laporan;

8) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah Rp. 309.128.000,- target 243 unit ;*

- a) Uraian Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan
Rp. 239.470.000,- target 30 unit;
- b) Uraian Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Rp. 69.658.000,- ,
target 212 unit;

B. *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Pagu anggaran perubahan Rp. 5.215.569.972,- dengan Uraian Kegiatan sebagai berikut :*

1) *Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Rp. 587.584.800,- dengan uraian Sub Kegiatan Sebagai berikut :*

- a) Uraian Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Rp. 77.657.500,- dengan target 1 dokumen;
- b) Uraian Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Rp. 126.837.500,- dengan target 1 laporan ;
- c) Uraian Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah Reformasi Birokrasi
Rp. 121.254.700,- dengan target 2 laporan ;
- d) Uraian Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Desa Rp. 74.802.700,-
dengan target 1 laporan ;
- e) Uraian Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Rp. 62.868.4000,- dengan target 2 laporan ;
- f) Uraian Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan
Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
Rp. 97.778.000,- dengan target 1 Dokumen;

- g) Uraian Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Rp. 26.386.000,- dengan target 1 Laporan;

2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Rp. 2.072.131.000,- dengan uraian Sub Kegiatan Sebagai Berikut:

- a) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Rp. 330.336.000,- dengan target 2 Dokumen;
- b) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 634.339.000,- dengan target 1 Dokumen;
- c) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Rp. 63.973.100,- dengan target 1 Dokumen;
- d) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Rp. 1.043.482.000,- dengan target 7 Dokumen ;

3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rp. 797.228.450,- dengan uraian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rp. 233.260.400,- dengan target 2 Dokumen;
- b) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kerlautan dan Perikanan Rp. 490.400.300,- dengan target 3 Dokumen ;
- c) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Manusia Rp. 73.567.750,- dengan target 1 Dokumen;

4) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi Rp. 936.332.062,- dengan uraian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Uraian Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Rp. 270.815.900,- dengan target 5 Dokumen;
- b) Uraian Sub Kegiatan Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi Rp. 497.325.662,- dengan target 2 Laporan ;

- c) Uraian Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Rp. 664.339.420,- dengan target 4 Laporan;
- d) Uraian Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Rp. 168.190.500,- dengan target 1 Laporan;
- e) Uraian Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Rp. 157.954.240,- dengan target 1 Laporan ;

1. Adapun Indikator Sasaran Program

No	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Cakupan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
		1.2 Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	1.2 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dan Tingkat kepatuhan Aparatur
		1.3 Meningkatnya Kualitas dan Dokumen Barang milik Daerah (BMD) dan kepatuhan Aparatur	1.3 Tingkat Kepatuhan Aparatur
		1.4 Meningkatnya kualitas dan Dokumen Kepegawaian Rata - rata nilai Kinerja SKP dan kepatuhan Aparatur	1.4 Rata - rata nilai Kinerja SKP
		1.5 Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Administrasi Umum dan RKBMD serta Konsistensi Renstra dan Renja	1.5 Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja
		1.6 Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	1.6 Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset

2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan, diperlukan langkah-langkah operasional sebagai berikut :

Indikator Rencana Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Bidang Sosial dan Kependudukan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bidang Inovasi Daerah	Cakupan Penelitian dibidang Pemerintahan Cakupan Penelitian dibidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Cakupan Penelitian dibidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Cakupan dibidang Inovasi dan Teknologi	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
2.1			Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Reformasi dan Birokrasi	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
			Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan asset Daerah, Reformasi dan Birokrasi	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Desa	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan /atau Evakuasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan pengkajian Peraturan	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
2.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
			Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah dan LSM	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah
2.3	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	OPD lingkup Pertanian, Kantor Kecamatan, Masyarakat (Petani/Pekebun, KTNA)	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah.
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang membindangi sektor Kelautan dan Perikanan, Kantor Kecamatan, Masyarakat (Nelayan Membudidayakan Ikanm & KTNA)	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat Daerah(realisasi 1 dok)
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Perangkat Daerah yang membidangi Sektor ESDM, Kantor Kecamatan, Masyarakat	
2.4	Program Penelitian dan Pengembangan	Bidang Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, LSM	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan oleh perangkat Daerah
			Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun /Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, LSM	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat Inovatif	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, LSM	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, LSM	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, LSM	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selaku OPD pendukung, memerlukan biaya operasional untuk melaksanakan amanah dan diberi anggaran sebagaimana tercantum dalam Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 dengan jumlah pagu Rp. 17.957.346.099,- yang terdiri dari 2 (dua) Program seperti dalam tabel berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 12.741.776.127,-
1	Uraian Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	441.328.292,-
2	Uraian Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.014.866.845,-
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	63.881.800,-
4	Uraian Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	80.011.420,-
5	Uraian Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.023.025,-
6	Uraian Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.455.040,-
7	Uraian Sub Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	419.533.222,-
8	Uraian Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	309.128.000-

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 13.600.600.000,-
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	587.584.800,-
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	2.072.131.000,-
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	797.228.450,-
4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	2.512.322.460,-

F. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Di dalam Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 terdapat target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1.	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah		69%	Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.969.266.710,-
		Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan	100%		3.456.994.250,-

		Indeks Inovasi Daerah.	52,56%		2.512.322.460,-

G. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat dalam menjalankan amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah (PD) kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Indikator Kinerja Utama. Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran kinerja, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana terlampir. Melalui Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah memiliki kejelasan arah, target kinerja serta tanggung jawab yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja dan anggaran merupakan bagian penting penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap target Kinerja harus didukung oleh ketesediaan anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja yang didukung oleh Penganggaran yang tepat, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur dan berorientasi pada hasil.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAMAN SETIAWAN, S.T.,M.T.

Jabatan : KEPALA BADAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

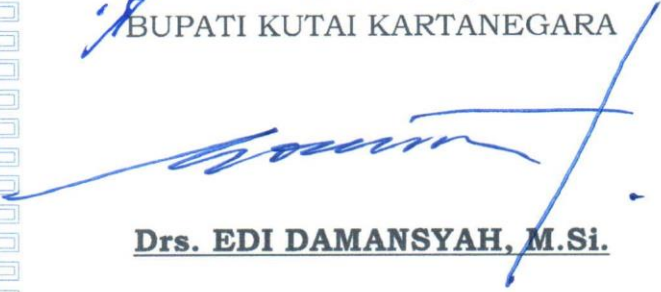
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

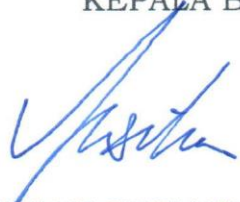
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN


MAMAN SETIAWAN, S.T., M.T.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197010051999031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100
		Indeks Inovasi Daerah	Skor Indeks	52,56
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

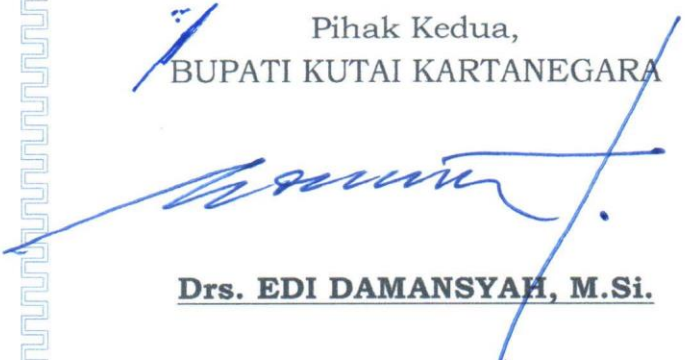
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

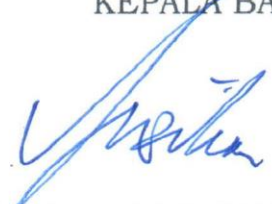
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.12.572.186.960	APBD
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.8.055.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.20.627.186.960	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN


MAMAN SETIAWAN, S.T.,M.T.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197010051999031011

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sebagai mana yang telah dijelaskan pada Bab II, maka ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan membandingkan tiga target Indikator Kinerja Utama dengan tiga realisasi Indikator Kinerja Utama pada akhir tahun 2025, hingga APBD-P 2025 sesuai target RPJMD 2021 – 2026 dengan hasil sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah	100 %	100 %	100

3.A.1 Perbandingann antara Target dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menetapkan sejumlah target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	%	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah					Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) didasarkan pada Target Dokumen dikarenakan dalam 1 dokumen terdapat lebih dari satu rekomendasi
1.1		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100	100	100	Untuk Rekomendasi hasil kajian semua sudah mendapat tanggapan dari PD penerima Manfaat
1.2		Indeks Inovasi Daerah	52,56	59,81	>100	Meningkatnya nilai / tingkat kematangan dari inovasi yang dibuat PD/kelompok/Individu

Di dalam Perjanjian Kinerja Brida Tahun 2025 terdapat target Indikator Kinerja Tambahan yang diperjanjikan Kepala BRIDA dengan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai dan tercapai yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL ISASI	%	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	81,48	81%	Capaian X 100 Target
		Indeks Inovasi Daerah	52,56	58,59	111%	<u>Capaian X 100 Target</u>
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	0,00	0%	<u>Capaian X 100 Target</u>
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30 (Baik)	90,56	103%	<u>Capaian X 100 Target</u>
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100	100	100%	Penilaian dari Arsip
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	3	3,83	128%	<u>Capaian X 100 Target</u>

6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100%	<u>Capaian X 100 Target</u>
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100	100	100%	Capaian X 100 Target
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100	100%	Capaian X 100 Target
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48 Laporan	48 Laporan	100%	<u>Capaian X 100 Target</u>
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	77	65,92	86%	<u>Capaian X 100 Target</u>
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	65	71,51	110%	<u>Capaian X 100 Target</u>

Secara umum , Realisasi Kinerja Brida tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan sebagian besar indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator sasaran yang belum terpenuhi karena kurangnya koordinasi internal. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun berikutnya.

3.A.2. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Sebagai pembanding untuk Capaian Kinerja tahun **2025** maka disajikan capaian kinerja pada tahun **2024** seperti pada tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah				
1.1		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100 %	100%	100
1.2		Indeks Inovasi Daerah	49,57	59,81	120

Sebagai informasi untuk Capaian Kinerja tahun **2024 dan Capaian tahun 2025** maka disajikan seperti pada tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	%
1.	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah				
1.1		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100 %	100 %	100
1.2		Indeks Inovasi Daerah	58,58	59,81	100

Indikator Sasaran 1 (satu) ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja yang mengedepankan sisi efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Kelitbangan dilingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah, pada APBD 2025 belanja Operasi target sasaran dengan 2 (dua) indikator sampai dengan per tanggal 31 Desember 2025 dapat diterangkan pada Indikator 1 (satu) terealisasi 100% dan Indikator 2 (dua) 120% meningkat 20% dari target. Tidak jauh berbeda dengan capaian pada tahun 2024 dari target sasaran dengan 2 (dua) indikator yang mana pada Indikator 1 (satu) terealisasi 100% dan Indikator 2 (dua) 125%. Dapat jelaskan selisih baik target maupun realisasi, prosentase dari tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu target tercapai, sedangkan Prosentase capaian tidak mengalami kenaikan tetapi sudah mencapai target , apabila dibandingkan persentase pertahun kondisi tahun 2024 melebihi target dan target capaian untuk tahun 2024 sesuai dengan target, untuk itu Indikator dan capaian kinerja dari Indikator sasaran 1 (satu) ini dapat digambarkan sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024			KETERANGAN
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100%	100%	100	Optimalisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Riset
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025			
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100%	100%	100	Optimalisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Riset

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Objek Kegiatan	Target / Dok	Realisasi / Dok	Rekomendasi
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			7	7	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Penyusunan Perda dan Inovasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	Pemekaran Desa Loa Janan Ulu	1 Dokumen	1 Dokumen	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu segera berkonsultasi hasil kajian pemekaran desa melalui penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, bimbingan teknis berkelanjutan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar kesiapan desa dapat berfungsi optimal sebelum menjadi desa definitif. Pemerintah Desa Loa Janan Ulu bersama masyarakat berkewajiban menyiapkan data dan dokumen yang akurat, melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten, serta mendukung proses transisi dan pembentukan kesiapan kelembagaan desa. Sementara itu, masyarakat Dusun Tegal Anyar diharapkan menjaga kekompakan dan partisipasi aktif, menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian, serta mendukung calon aparatur desa guna menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.

		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangandan Aset Daerah Reformasi Birokrasi Tenaga Perpustakaan di Kecamatan dan Desa	Tenaga Perpustakaan di Kecamatan dan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kajian ini memberikan izin pengelolaan perpustakaan melalui peraturan dan kebijakan lokal yang menetapkan tugas pengelola serta mengintegrasikan program literasi ke dalam RPJMDes dan RKPDes. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan melalui pelatihan kepustakawanan dan pemberian insentif atau dukungan operasional. Pemanfaatan sumber daya lokal dan Dana Desa perlu dioptimalkan untuk mendukung kegiatan literasi dan pengembangan perpustakaan. Peran kecamatan juga perlu diperkuat dalam pelatihan, pemantauan, serta fasilitasi koordinasi antar desa. Selanjutnya diperlukan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai keberadaan, aktivitas, dan dampak perpustakaan.
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah	Pemekaran Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Pemerintah Kelurahan Loa Ipuh Darat disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menyediakan persyaratan teknis pembentukan Desa Binsamar, khususnya verifikasi jumlah penduduk yang belum memenuhi ketentuan minimal pembentukan desa baru. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penentuan titik koordinat dan penyusunan peta rencana Desa Binsamar. Selanjutnya, apabila seluruh persyaratan pembentukan desa telah terpenuhi, pemerintah kelurahan perlu segera mengoordinasikan koordinasi terkait aspek teknis usulan pemekaran dengan instansi terkait.

		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jurnal Buletin	1 Dokumen	1 Dokumen	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan data kelitbangan serta penerbitan jurnal perlu dilakukan guna menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas publikasi. Evaluasi yang dilakukan secara rutin menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan serta memastikan bahwa pengelolaan dan diseminasi hasil kelitbangan berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Pemekaran Desa Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai	1 Dokumen	1 Dokumen	Pemerintah Desa Jantur Selatan bersama Tim Pemekaran disarankan untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta pihak terkait lainnya dalam rangka penetapan batas wilayah Desa Jantur Selatan melalui Peraturan Bupati sebagai persyaratan persyaratan teknis pembentukan desa yang masih belum terpenuhi. Selain itu, pemerintah desa perlu terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyatukan dan mengakui kemajuan usulan pembentukan desa baru hasil pemekaran Desa Jantur Selatan.
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Pembayaran honorarium PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, guna menjamin kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan perlu terus didukung melalui penatausahaan honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dukungan ini penting untuk menjamin kelancaran koordinasi, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan. Selain itu, diperlukan penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi administratif agar pelaksanaan sub kegiatan berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Objek Kegiatan	Target / Dok	Realisasi / Dok	Rekomendasi
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			7	7	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Survey Indeks Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1) Akses jalan ke kota dari kecamatan yang perlu menjadi perhatian, akses jalan memberikan kemudahan dan peningkatan kesejahteraan. 2) Peningkatan Kualitas pendidikan baik guru maupun sarannya. Diperlukan kebijakan percepatan pemerataan pembangunan fisik khusus Sekolah Dasar (SD). 3) Kebijakan percepatan pembangunan fasilitas Kesehatan yakni Rumah Sakit. 4) Strategi dan kolaboratif lintas sektoral dalam menyediakan akses permodalan dan pekerjaan bagi masyarakat setempat di Kabupaten Kutai Kartanegara. 5) Program yang dapat secara spesifik dan mudah diakses untuk kelompok pensiunan produktif dan kelompok perempuan kategori IRT dengan ekonomi rentan. 6) Upaya strategis dibutuhkan secara berkelanjutan dalam melakukan pemetaan wilayah dan pencegahan potensi kerusakan lingkungan. Fokus pada peningkatan kualitas udara dan pengelolaan sampah. 7) Dibutuhkan perluasan kebijakan bantuan sosial yang dapat menyentuh secara maksimal bagi masyarakat lansia (65 tahun ke atas). 8) Peningkatan tenaga keamanan/polisi, bisa dibuat intensitas jadwal. 9) Kebijakan pengelolaan UMKM dan BUMDES, sehingga dapat membuka pusat-pusat ekonomi baru sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan.

			Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	1. Dinas Pendidikan (Melaksanakan rekrutmen dan distribusi guru berbasis zonasi prioritas kecamatan dengan rasio murid-gru tinggi, memperluas pendirian PAUD berbasis komunitas kelompok bermain, pos PAUD terpadu untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan layanan formal, menyiapkan sistem monitoring rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah secara digital berbasis data spesial) 2. Dinas Kesehatan (Menyusun roadmap peningkatan kapasitas layanan termasuk pembangunan rumah sakit pratama dan peningkatan jumlah poliklinik serta pustu, melaksanakan program layanan kesehatan keliling mobile clinic dan telemedicine di wilayah akses sulit, memberikan insentif retensi tenaga kesehatan khususnya dokter umum, dokter gigi, dan bidan di wilayah terpencil). 3. Dinas Tenaga Kerja (Menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis sektor unggulan pertanian,tambang,logistik,ekonomi kreatif yang terintegritasi dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja, mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi dengan data kependudukan yang terbaru, mendorong inkubasi kewirausahaan pemuda untuk memperluas lapangan kerja formal. 4. Bappeda (Menetapkan Klaster wilayah pertumbuhan penduduk sebagai dasar perencanaan spasial dan pengalokasian anggaran pembangunan, Mengembangkan sistem informasi geospasial kependudukan dinamis sebagai instrumen peringatan dini dan pengambilan keputusan berbasis bukti, Memastikan sinkronisasi RPJMD dan Renstra OPD dengan proyeksi demografi terbaru).
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Deliniasi dan Zonasi Cagar Budaya di Muara Kaman	1 Dokumen	1 Dokumen	Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan yang telah didapatkan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan survei tinggalan arkeologis pada Daerah Aliran Sungai Kedang Rantau ke arah hulu, secara khusus di wilayah Desa. Sabintulung, Desa. Menamang Kiri dan Menamang Kanan, dan Desa. Sedulang, mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait adanya tinggalan pemukiman masa lalu dengan ditemukannya bekas makam kuno dan beberapa artefak seperti keramik, gerabah, dan peralatan dari Kajian Deliniasi dan Zonasi Kawasan Cagar Budaya di Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara VI - 3 besi. Hal ini dilakukan untuk melihat potensi sebaran peradaban dan perkembangan kebudayaan secara spasial serta konektivitasnya dengan Kerajaan Kutai di Muara Kaman. 2) Melakukan ekskavasi lanjutan di sekitar kotak TP 1 Martapura yang diduga masih menyimpan potensi tinggalan arkeologis dari masa Kerajaan Kutai di Muara Kaman. 3) Melakukan pengamanan di sekitar lokasi temuan struktur bata di dekat Lesong Batu yang saat ini masih terkubur di dalam tanah. Struktur bata yang masih dalam posisi aslinya (intact) ini dapat menjadi sebuah temuan struktur yang sangat penting bagi pengembangan kajian di Kawasan Muara Kaman. 4) Melakukan Kajian Tata Letak dan/atau Tata Pamer serta Kajian Koleksi Museum Muara Kaman (Museum Lesong Batu) sebagai sebuah upaya pengembangan dan pemanfaatan benda-benda peninggalan hasil penelitian selama ini di Muara Kaman. Selain itu, sebagai upaya untuk menjadikan museum ini sebagai tempat yang aman bagi masyarakat sekitar Muara Kaman untuk menitipkan artefak koleksi pribadi mereka, sehingga dapat memperkaya koleksi peninggalan Kerajaan Kutai di Muara Kaman dari hasil temuan masyarakat sekitar. 5) Memberikan batas-batas sebaran temuan

						dalam bentuk delineasi Kawasan Cagar Budaya, serta melakukan pengaturan pemanfaatan ruang dalam bentuk zonasi Cagar Budaya di Kawasan Muara Kaman secara menyeluruh dan terpadu sebagai upaya pelestarian dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat Muara Kaman dari sektor warisan budaya.
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Identifikasi Potensi Wisata Alam di Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1 Dokumen	Rekomendasi Strategis Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, maka disusun sejumlah rekomendasi yang bersifat strategis sebagai berikut: 1. Lokasi Desa Loa Raya Layak dan potensial terhadap pengembangan potensi maka di rekomendasikan untuk membuat kajian lebih lanjut guna menunjang realisasi pengembangan Atraksi wisata di Desa Loa Raya, terutama untuk jenis wisata edukatif, konservasi, agro, dan event olah raga lokal. 2. Dengan jarak tempuh Lokasi desa yang dekat dengan pusat kota Kecamatan Tenggarong maupun Kota Samarinda, Namun di rekomendasikan mengolah sarana digital di semua media dalam memudahkan akses wisatawan dalam perjalanan menuju Lokasi sekaligus sebagai penguat sarana promosi dan mengadakan kajian tentang peningkatan hingga perbaikan infrastruktur untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengunjung. 3. Daya Tarik Wisata eksisting Desa Loa Raya sangat bergantung pada kondisi dan pemandangan aliran air Sungai dataran tinggi yag bersumber dari mata air perbukitan sehingga memerlukan pengelolaan air dan investasi kecil untuk penyediaan fasilitas dasar. Apabila kondisi alam tidak memungkinkan untuk menarik kunjungan pada moment tertentu (penurunan debit air) maka, perlu merumuskan perencanaan dalam kajian membangun sarana lain agar tetap menjaga tingkat kunjungan wisatawan bekunjung ke Laporan Akhir Identifikasi Potensi Wisata Alam di Tenggarong Seberang 85 Desa Loa Raya, Adapun sarana yang tepat ialah lapangan Sepak Bola (Mini Socer) di lahan depan Kantor Desa Loa Raya. 4. Desa Loa Raya secara keseluruhan sangat layak dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis edukasi, konservasi, olah raga, dan agrowisata. Ketersediaan lahan datar, aksesibilitas baik, serta curah hujan yang tinggi memberikan peluang besar, meskipun dibutuhkan pengelolaan air dan pelatihan masyarakat agar pengembangan berjalan
			Survei IKLI	1 Dokumen	1 Dokumen	Berdasarkan hasil survei IKLI yang telah dilakukan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur: 1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menambah ketersediaan sarana dan prasarana instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) yang berlokasi strategis sehingga dapat diakses dari tiap kecamatan. Pemerintah harus menjamin kualitas fisik bangunannya serta memastikan pengoperasiannya dapat berjalan optimal dan terpadu. 2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mempertimbangkan untuk menambah ketersediaan terminal di setiap kecamatan serta meningkatkan kualitas fisik terminal yang sudah ada menjadi lebih baik. Selain itu, pemerintah juga perlu meninjau ulang kesesuaian terminal dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. 88 3. Pemerintah Kutai Kartanegara dapat memfokuskan

						pembangunan berbasis potensi dan permasalahan lokal khususnya pada sektor infrastruktur perekonomian. Pembangunan dan layanan infrastruktur seperti pasar dan pariwisata dapat dilakukan melalui analisis potensi dan identifikasi masalah di setiap kawasan. Pengembangan infrastruktur khusus seperti pasar seni dan industri kreatif yang terintegrasi dengan infrastruktur pariwisata berbasis pada potensi ekonomi lokal perlu dipertimbangkan. Hal ini dapat menjadi solusi atas permasalahan buruknya kualitas fisik bangunan pasar atau pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan infrastruktur pertanian seperti embung, irigasi, dan jalan usaha tani. Selain meningkatkan ketersediaan fisik infrastruktur pertanian di setiap wilayah pertanian, pemerintah juga perlu melakukan perbaikan kualitas fisik infrastruktur-infrastruktur tersebut. Pemerintah harus memastikan aksesibilitas kawasan pertanian dengan menambah ketersediaan jalan usaha tani pada lokasi-lokasi yang belum tersentuh. Selain itu, infrastruktur irigasi dan embung perlu dikelola secara terpadu dan profesional melalui kolaborasi antar pemerintah dengan kelompok petani sehingga pembangunannya sesuai harapan dan bermanfaat secara efektif
			Survei KUB	1 Dokumen	1 Dokumen	Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Edukasi dan Sosialisasi Sejak Dini ▪ Masukkan nilai-nilai keberagaman, toleransi kesetaraan dan kerjasama dalam kurikulum pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. ▪ Lakukan edukasi luas tentang risiko SARA, ujaran kebencian, dan politik identitas, khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan. 2) Penguatan Literasi Digital ▪ Perlu dilakukan program literasi digital keagamaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks dan disinformasi SARA. ▪ Gunakan media sosial dan platform digital sebagai sarana kampanye toleransi, keberagaman, dan narasi positif. 3) Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil ▪ Perlu ditingkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus SARA secara profesional untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.. ▪ Berikan sanksi tegas kepada pelaku penyebaran ujaran kebencian, provokasi, dan politisasi SARA tanpa pandang bulu untuk menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. 4) Pembinaan Tokoh Adat, Agama, dan Komunitas ▪ Manfaatkan peran tokoh agama, tokoh adat, ormas, dan komunitas lokal sebagai garda depan untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan masyarakat. Buat forum komunitas yang dapat menjadi wadah untuk mediasi dan resolusi konflik dengan menggunakan kearifan lokal sebagai dasar penyelesaian. 5) Kebijakan Publik yang Inklusif ▪ Jadikan prinsip nondiskriminasi sebagai landasan kebijakan pemerintah untuk memastikan semua warga negara diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang mereka.

					▪ Lindungi hak-hak warga negara sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua. 6) Sinergi Lintas Sektor ▪ Buat tim koordinasi antarinstansi untuk mencegah penyebaran isu SARA, terutama menjelang pemilu, guna menjaga stabilitas dan keamanan nasional. ▪ Perkuat peran FKUB, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan kerukunan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ▪ Pastikan semua penyelenggara layanan publik memberikan layanan yang adil dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara ▪ Jadikan pelayanan publik sebagai representasi nilai persatuan, kesetaraan, dan gotong royong. 8) Pemanfaatan Indeks SARA sebagai Instrumen Kebijakan ▪ Pemerintah daerah perlu memasukkan hasil Indeks KUB dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, dan program sosial). ▪ Lakukan pengukuran Indeks KUB secara berkala untuk memantau perkembangan kerukunan masyarakat dari tahun ke tahun. 9) Pengembangan dan Pengimplementasian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang lebih spesifik terkait pemetaan wilayah atau kelompok berdasarkan afiliasi agama. ▪ Pemerintah Indonesia melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kutai Kartanegara, Kementerian Agama dan lembaga terkait perlu melakukan pengukuran Indeks KUB yang lebih spesifik V - 3 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 terkait pemetaan wilayah atau kelompok berdasarkan afiliasi agama, yang dapat menimbulkan tantangan seperti polarisasi, diskriminasi, dan potensi konflik jika disalahgunakan atau didasarkan pada pandangan ekstrem
--	--	--	--	--	--

			Survei IKM terhadap Implementasi Prog. Dedikasi	1	1	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk kedepannya dapat menjadi pembelajaran jika ingin melaksanakan program serupa: 1. Program sebaiknya disederhanakan dalam bentuk slogan sehingga mudah diingat oleh masyarakat 2. Kepada seluruh dinas sebaiknya meningkatkan sosialisasi Program Dedikasi Bupati Kutai Kartanegara ke masyarakat, sebab masyarakat kurang mengenali nama-nama program meski sebenarnya merasakan manfaatnya 3. Melakukan sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan implementasi Program Dedikasi Bupati Kutai Kartanegara 4. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan monitoring secara berkala pada implementasi Program Dedikasi Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi tanggung jawab setiap OPD
3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1. Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	1 Dokumen	1 Dokumen	1. Upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian utama agar pengeluaran rumah tangga petani lebih terlindungi, sehingga daya tukar tidak mudah tertekan oleh fluktuasi harga. 2. Penguatan pendapatan petani berpotensi didorong melalui diversifikasi usaha tani (misalnya kombinasi padi dengan hortikultura atau ternak kecil), serta pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah seperti beras kemasan berlabel, tepung beras . 3. Kestabilan harga komoditas utama, khususnya gabah/beras dan tandan buah segar sawit, penting untuk menjaga NTP. Penguatan rantai pasok dan tata niaga diperlukan agar kerentanan terhadap fluktuasi harga dapat dikurangi.. 4. Peningkatan efisiensi biaya produksi perlu didorong melalui distribusi pupuk dan benih bersubsidi yang lebih tepat sasaran, pemanfaatan pupuk organik, dan penerapan teknologi budidaya yang efisien. 5. Penguatan kelembagaan petani berpeluang meningkatkan posisi tawar, baik melalui kelompok tani pada komoditas padi maupun koperasi plasma pada kelapa sawit. Untuk padi, pemanfaatan pemasaran digital dapat menjadi alternatif memperluas akses pasar beras dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Sementara pada kelapa sawit, penguatan kelembagaan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Komoditi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara VI - 3 koperasi penting untuk memperkuat posisi tawar harga TBS terhadap pabrik pengolahan. 6. Pemanfaatan varietas unggul, penerapan teknologi tepat guna, dan penyuluhan lapangan yang konsisten perlu difasilitasi untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan tanpa mengabaikan keberlanjutan lahan.

			2. Survey Laju Pertumbuhan PDRB	1 Dokumen	1 Dokumen	1) Rekomendasi untuk Peningkatan: Untuk meningkatkan laju PDRB di Kutai Kartanegara, diperlukan langkah-langkah strategis seperti revitalisasi produksi pertanian dengan teknologi modern, penguatan lembaga penyuluhan, peningkatan produksi perikanan melalui teknologi budidaya, serta diversifikasi produk peternakan dan perkebunan. Selain itu, konservasi sumber daya dan pengelolaan ekosistem juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Rekomendasi yang rinci tertera pada Tabel 5.1 2) Keterkaitan dan Sinergi: Semua sektor saling terkait dan memerlukan sinergi dalam pengelolaannya. Pendekatan yang terintegrasi yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta akan sangat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kutai Kartanegara.
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Penyusunan Pra Desain Pembangunan Pakan Ternak Skala Kecil Berbahan Baku Potensi Lokal.	3	3	Untuk tahap awal dengan kapasitas produksi 0,5–1 ton per jam yang dikelola oleh BUMDes atau koperasi dan hanya memiliki satu lini produksi, direkomendasikan menggunakan desain tanpa sekat pada bangunan baja ringan berukuran 8×10 meter. Tata letak perlu diperkuat dengan sistem zonasi yang jelas menggunakan penanda seperti tape atau rel, penerapan prinsip FIFO (First In First Out), pemasangan dust collector untuk mengendalikan debu, serta ventilasi yang memadai. Penempatan gudang bahan baku di sisi kiri dan gudang produk jadi di sisi kanan dengan pintu lebar untuk arus masuk dan keluar barang akan meningkatkan efisiensi dan kelancaran alur kerja. Pra Desain Industri Pakan Ternak Skala Kecil Berbahan Baku Potensi Lokal di Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu VI - 6 Jika kapasitas produksi meningkat atau target beralih ke produksi multi-produk dengan sertifikasi mutu, disarankan untuk melakukan upgrade ke desain dengan sekat. Pemisahan ruang produksi dari gudang bahan baku dan gudang produk jadi akan memperkuat sistem higiene dan mempermudah pemenuhan standar seperti HACCP. Tambahan ruang QC atau ruang kontrol serta area khusus untuk limbah dan debu akan meningkatkan mutu produksi dan keamanan pangan. Untuk skala ini, perlu disiapkan CAPEX bangunan dan infrastruktur pada kisaran Rp 400–600 juta untuk kapasitas 1 ton per jam. Berdasarkan hasil kajian pradesain, pembangunan mini pabrik pakan ternak di Kecamatan Loa Kulu dinilai layak tidak hanya dari sisi teknis dan finansial, tetapi juga dari ketersediaan bahan baku, infrastruktur pendukung, serta kesiapan sosial-

					ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilan operasional mini pabrik tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik bangunan dan peralatan, melainkan juga oleh efektivitas pengelolaan. Pengelolaan yang terstruktur melalui kelembagaan lokal seperti BUMDes, koperasi, atau UMKM akan menjadi kunci utama agar unit produksi dapat berjalan secara efisien, transparan, dan berkelanjutan. Mini pabrik harus berfungsi bukan sekadar sebagai unit produksi, tetapi juga sebagai simpul ekonomi desa yang mengintegrasikan petani, pembudidaya ikan, pelaku UMKM, serta lembaga keuangan lokal dalam satu ekosistem rantai pasok yang saling menguatkan. Dengan demikian, keberadaan mini pabrik dapat memberikan dampak nyata dalam menekan biaya pakan, meningkatkan daya saing produk ternak dan ikan lokal, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
			2. Fasilitasi Perancangan Sistem Informasi Zona Tangkapan Ikan.		1. Untuk Nelayan: Disarankan untuk menggunakan data ZPPI agar dapat menghemat waktu dan bahan bakar saat mencari ikan. Jika kondisi perairan laut kurang subur, nelayan dapat menangkap ikan di Muara Mahakam karena kandungan klorofil-a yang selalu tinggi di sana. 2. Untuk Pemerintah Daerah: ● Pengembangan Sistem Informasi: Membuat Sistem informasi ZPPI (SiZiPPi) yang dapat diakses oleh nelayan untuk mendapatkan informasi ZPPI secara real-time. ● Perencanaan Tata Ruang Perikanan: Memanfaatkan data spasial dari kajian ini untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Peta ZPPI ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang mendorong nelayan menuju area penangkapan ikan yang paling produktif, menghindari penangkapan berlebihan di area tertentu. ● Penerapan Teknologi: Menerapkan teknologi pengolahan citra satelit seperti Google Earth Engine (GEE) untuk analisis data geospasial kelautan yang lebih cepat dan efisien. GEE memungkinkan pengolahan data multi-sensor dengan resolusi spasial tinggi, yang sangat berguna untuk pemetaan ZPPI di wilayah pesisir. 58 Perancangan Sistem Informasi Zona Tangkapan Ikan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara

						● Diperlukan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian kepada para nelayan kecil dalam bentuk pelatihan penggunaan Avenza. 3. Untuk Penelitian Lanjutan: Validasi model ZPPI dengan data lapangan (in-situ) seperti SPL, klorofil-a, dan jumlah ikan dari fish finder perlu dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan model.
			3. Penyusunan Indeks Nilai Tukar Komuditi Kelautan Dan Perikanan (NTN dan Nilai tukar Pembudidaya Perikanan)	1 Dokumen	1 Dikumen	1. Penguatan Sistem Produksi dan Pemasaran – Perlu intervensi untuk menekan biaya input melalui subsidi atau kemitraan usaha, serta pembentukan jejaring pemasaran yang lebih luas dan berbasis digital agar harga jual lebih kompetitif. 2. Diversifikasi Produk dan Inovasi Pascapanen – Mendorong nelayan dan pembudidaya mengembangkan olahan hasil perikanan bernilai tambah untuk mengurangi risiko fluktuasi harga produk segar. 3. Peningkatan Akses Permodalan dan Teknologi – memperluas akses pada pembiayaan mikro dan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan. 4. Penguatan Kelembagaan Lokal – Meningkatkan kapasitas koperasi/keompok nelayan sebagai wadah pengelolaan bersama, termasuk dalam pengadaan input, pemasaran, dan advokasi kebijakan. 5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan – Melakukan pemantauan rutin NTN dan NTPi sebagai indikator kinerja sektor perikanan daerah, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan lingkungan. 6. Untuk mendorong peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), keterlibatan generasi muda atau nelayan milenial menjadi sangat penting. Kehadiran mereka diharapkan mampu menghadirkan transformasi sektor perikanan melalui penerapan teknologi modern, pemanfaatan platform digital untuk pemasaran, diversifikasi produk, serta pengembangan usaha kreatif seperti ekowisata dan ekspor hasil perikanan

		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Analisis Kandungan Abu Batu Bara Sebagai Limbah Bahan Baku Sumber Energi Listrik (ESDM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1. Bila dilihat dari beberapa karakteristik P - Total dan P - Tersedia serta tingginya kation basa, ditambah ketersediaan bahan yang berlimpah dan sebagian besar belum dimanfaatkan dan dianggap limbah maka ATB yang dihasilkan dari PLTU sangat potensial sebagai pembenah tanah seperti tanah Ultisol yang mendominasi lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Keberadaan logam berat yang terdapat dalam ATB memerlukan penelitian intensif dan jangka panjang sebelum pemanfaatan abu tersebut dalam skala luas, terutama untuk memastikan tidak terjadi masalah baru (akumulasi logam berat) khususnya ketika pH tidak dapat dipertahankan sekitar netral dan/atau keterbatasan penyediaan bahan organik (kontinyu) sebagai pengkhelet logam berat.
--	--	--	--	-----------	-----------	--

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Objek Kegiatan	Target / Dok	Realisasi / Dok	Rekomendasi
4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi Daerah			12	12	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Monitoring dan hasil inovasi daerah Kab. Kukar Tahun 2025	1 dokumen	1 dokumen	1. Penguatan kelembagaan BRIDA sebagai koordinator monev dan pusat inovasi daerah dengan sistem basis data terpadu, 2. Integrasi hasil monev ke perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD) agar inovasi tidak berhentidi tahap implemetasi, 3. Penyediaan dana inovasi daerah untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi inovasi berprestasi, 4. Peningkatan Kapasitas SDM inovator dan pelaksana lapangan melalui pelatihan bimtek dan sertifikasi, 5. Digitalisasi sistem monev inovasi agar hasil evaluasi terdokumentasi dan terukur secara real-time, 6. Replikasi dan pemetaan inovasi tematik pada sektor kesehatan, ekonomi, desa, dan pelayanan publik sebagai model unggulan Kukar 2025-2029.
			2. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (RIPJ-PID)	1 Dokumenn	1 Dokumen	1. Penguatan Kapasitas SDM dan infrastruktur riset dengan cara meningkatkan kompetensi SDM dalam riset dan inovasi melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta dukungan terhadap program magang dan beasiswa. Program ini mencakup pelatihan keterampilan dasar sampai dengan penguasaan teknologi terbaru, untuk menunjang kemampuan riset berbasis teknologi. Memperkuat infrastruktur riset dengan membangun laboratorium riset yang memadai, meningkatkan akses digital, serta membentuk inkubator bisnis yang mendukung pengembangan inovasi daerah. Infrastruktur riset yang lebih baik akan membuka peluang lebih luas bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengoptimalkan hasil riset yang aplikatif dan berdaya guna. 2. Pengembangan dan Integrasi Basis Data Riset dan Inovasi akan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan

						dengan berbasis data. Pengelolaan data riset yang terpusat (centralized) akan memudahkan proses diseminasi dan pemanfaatan hasil riset oleh berbagai pemangku kepentingan. 3. Kolaborasi antarpihak dalam mendukung inovasi dengan cara mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara BRIDA, lembaga riset, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk memperluas jaringan inovasi. Kolaborasi ini akan mempercepat penemuan-penemuan baru untuk mengatasi tantangan, serta mendorong keberlanjutan pengembangan inovasi daerah 4. Penguatan kebijakan inovasi yang responsif dan adaptif, harus disesuaikan dengan kondisi daerah akan mendorong fleksibilitas dalam pelaksanaan riset serta inovasi di daerah. Melalui reformasi kebijakan, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global, serta tantangan yang muncul dalam pembangunan wilayah. Kebijakan yang kuat juga memungkinkan adanya perlindungan terhadap inovator dalam mengembangkan solusi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 5. Diseminasi dan publikasi hasil riset dan inovasi, melalui berbagai platform publikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini akan memperkenalkan hasil riset Kabupaten Kutai Kartanegara kepada khalayak yang lebih luas, mendorong pengakuan global, serta menarik investor untuk mendukung komersialisasi inovasi daerah.
		Uji Coba Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan penerapan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Pertanian Terpadu)	1	1	Pembuatan alat sebagai pengembangan teknologi inovasi sangat dibutuhkan masyarakat sebagai contoh yang sudah dilaksanakan yaitu Pembuatan Green House Sebagai Fasilitas Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Pertanian Terpadu) lengkap dengan panel surya dan sistem irigasi.
			Jumlah		43	

Pada Tahun 2025 Indikator Sasaran 2 ini dimaksudkan untuk menggambarkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Kutai Kartanegara, guna mencapai target tersebut Badan Riset dan Inovasi dalam APBD-P 2025 melakukan pendampingan untuk mendukung kegiatan Pekan Inovasi Daerah, untuk itu Badan Riset dan Inovasi Dearah meningkatkan sosialisasi, serta pendampingan secara kontinu, Renstra 2021 – 2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah menargetkan skor IID sebesar 52,56 namun dalam target tersebut dapat dilampaui sesuai berita surat Kementerian Dalam Negeri IID Kabupaten Kutai Kartanegara dengan skor 59,81 predikat Kabupaten Inovatif, hasil IID dari Kemendagri ini jauh melampaui target/lebih tinggi dari tahun ke 6 pelaksanaan Renstra 2021 – 2026, lebih meningkat dari tahun 2024 dengan target 49,57 dan realisasi skor 58,59 predikat Kabupaten Inovatif, Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 2 ini dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Inovasi Daerah	49,57	58.59	118
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Inovasi Daerah	52,56	59,81	113

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan nilai pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 58,59 dengan peringkat 87 secara nasional. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya inovasi melalui perangkat daerah, termasuk peran aktif Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memfasilitasi, mendokumentasikan, dan melaporkan inovasi daerah.

Selanjutnya pada tahun 2025, nilai Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan menjadi 59,81. Secara substansi, terjadi kenaikan skor yang menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek tata kelola inovasi, dukungan regulasi, serta implementasi inovasi pada perangkat daerah. Namun demikian, secara peringkat nasional Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi 105, yang menunjukkan adanya dinamika dan peningkatan kompetisi antar daerah di tingkat nasional.

Perbedaan antara kenaikan nilai dan penurunan peringkat tersebut menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah khususnya Brista Kab. Kutai Kartanegara . Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan kinerja inovasi secara internal, diperlukan penguatan pada aspek kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi agar mampu bersaing lebih optimal di tingkat nasional.

3.A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Target kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan, program, indikator, serta target capaian jangka menengah yang harus diwujudkan secara bertahap setiap tahun.

Sebagai pembandingan realisasi kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah kab. Kutai Kartanegara sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Indikator Tujuan/Sasaran Kinerja	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Renstra sampai tahun 2025	Persentase Realisasi Target Renstra sampai Tahun 2025
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100	100	100 %
Indeks Inovasi Daerah	870	59,81	6,9%

Berikut adalah tabel Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang terdapat didalam Rensta 2021-2026 , sebagai bahan pembandingan capaian kinerja tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah	Persen	28,6	a.n	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor	140	360	420	560	710	870	1260	1260
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Predikat	78,23 (BB)	81 (BB)	84 (A)	87 (A)	91 (A)	93 (AA)	95 (AA)	95 (AA)

Perbandingan antara target dalam Rencana Strategis (Renstra) dan realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator sasaran pertama dan ke 3 (tiga) di tahun 2025 dapat mencapai target realisasinya. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan program tahunan.

Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2025 pada awalnya ditetapkan di Renstra Brida tahun 2021-2026 dengan target 870. Target tersebut mengacu pada metode pengukuran yang disusun sebelum tahun 2024,yang mana nilai inovasi daerah dihitung dengan akumulasi skor dari berbagai indikator sehingga menghasilkan angka yang relatif besar, misalnya ratusan hingga mendekati seribu. Oleh karena itu banyak pemerintah daerah menetapkan target seperti 800–1000. Seiring terbitnya regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun2024, terjadi perubahan pada mekanisme, indikator, serta skala penilaian Indeks Inovasi Daerah. Sistem pengukuran yang sebelumnya menggunakan nilai ratusan kemudian disesuaikan menjadi skala indeks yang lebih sederhana dan proporsional. Dengan adanya perubahan tersebut, target kinerja pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian menjadi 52,56.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan, capaian kinerja IID Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 mencapai 59,81, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah melalui BRIDA dalam mendorong penguatan ekosistem inovasi, peningkatan kualitas pelaporan inovasi, serta pemanfaatan hasil inovasi daerah telah berjalan dengan baik.

Keberhasilan tersebut juga mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, serta berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

3.A.4. Analisis penyebab keberhasilan.

Pada Tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menunjukkan capaian kinerja yang baik sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Keberhasilan ini tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator strategis, khususnya pada pelaksanaan kajian, fasilitasi inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelaporan inovasi yang mendukung penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan dalam mendorong budaya inovasi. Selain itu, BRIDA juga mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dalam Rencana Strategis dengan implementasi program dan kegiatan tahunan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan BRIDA dalam mengatasi berbagai kendala selama Tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaporan inovasi.
2. Penguatan kolaborasi dengan akademisi dan mitra strategis untuk meningkatkan kualitas kajian.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil kajian, salah satunya dengan cara membuat surat pernyataan akan memanfaatkan hasil kajian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Melalui langkah-langkah tersebut, BRIDA mampu mempertahankan kinerjanya serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

3.A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BRIDA) melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana.

Dari sisi anggaran, realisasi belanja difokuskan pada kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja strategis, seperti pelaksanaan kajian strategis dan fasilitasi inovasi daerah. Optimalisasi perencanaan kegiatan serta pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan output yang terukur dan berdampak.

Dari sisi sumber daya manusia, BRIDA melakukan pembagian tugas yang proporsional serta mendorong peningkatan kapasitas melalui koordinasi, pendampingan, dan kerja kolaboratif. Pemanfaatan tim kerja lintas fungsi juga menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel tanpa mengurangi kualitas hasil kajian dan layanan inovasi.

Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan data, koordinasi, dan pelaporan kinerja turut mendukung efisiensi waktu dan biaya operasional. Pendekatan ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dievaluasi. Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, tercermin dari tercapainya sebagian besar target kinerja dengan pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang terkendali. Ke depan, BRIDA akan terus memperkuat perencanaan berbasis kinerja dan pengendalian internal guna meningkatkan nilai manfaat setiap sumber daya yang digunakan bagi pembangunan daerah.

3.A.6. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BRIDA) Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dirancang secara terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis. Program yang dilaksanakan difokuskan pada penguatan fungsi riset, fasilitasi inovasi, serta peningkatan tata kelola kelembagaan.

Salah satu program utama yang menunjang capaian kinerja adalah pelaksanaan kajian strategis daerah. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi perangkat daerah, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kegiatan fasilitasi dan pembinaan inovasi perangkat daerah turut berkontribusi dalam meningkatkan jumlah serta kualitas inovasi yang dilaporkan dan dinilai secara nasional.

Program pendukung lainnya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui koordinasi, pendampingan teknis, dan sinergi lintas sektor. Upaya ini mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih efektif antara BRIDA dan perangkat daerah dalam mengimplementasikan hasil kajian dan inovasi.

Di sisi tata kelola, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi program serta optimalisasi pelaporan kinerja turut memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai target dan memberikan output yang terukur. Integrasi program dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis juga menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pencapaian sasaran.

Secara keseluruhan, kombinasi antara program kajian, fasilitasi inovasi, penguatan kapasitas, dan perbaikan tata kelola menjadi faktor kunci yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

B. REALISASI ANGGARAN 2025

Pada tahun anggaran 2025 (Murni) pagu anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 20.627.186.960,- dan mengalami penurunan atau efisiensi anggaran sampai 3 (tiga) kali pada anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 2.669.840.861,- menjadi sebesar Rp. 17.957.346.099,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Uraian Sub Kegiatan		12.741.776.127,-	16.263.756.077,-	91.46	100
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	441.328.292,-	437.677.565,-	99.17	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.014.866.845,-	10.034.951.474,-	91.10	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	63.881.800,-	63.051.498,-	98.70	87.50
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	80.011.420,-	79.765.000,-	99.69	33.33
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.571.508,-	289464.512,-	88.37	0.00
6	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	85.455.040-	50.527.000	59.13	100
7	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	419.533.22,-	396.446.004,-	94.50	100
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	309.128.000,-	302.246.864,-	97.77	99.59

b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Uraian Sub Kegiatan		19.534.210.438,-	18.640046.291,-	94.14	100
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	587.584.800,-	582.046.440,-	99.06	100
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	2.072.131.000-	2.062.128.822,-	99.52	100
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	797.228.450,-	768.018.798,-	96.34	100
4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.758.625.722-	1.197.434.300,-	68.09	220

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BRIDA) mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebanyak 3 (tiga) kali sebagai bagian dari kebijakan pengendalian belanja daerah dan penyesuaian terhadap dinamika fiskal. Kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada penyesuaian pagu anggaran, namun tidak mengurangi komitmen BRIDA dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Meskipun terjadi efisiensi anggaran sebanyak tiga kali, capaian kinerja BRIDA tetap menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dicapai melalui strategi penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan masyarakat pelaku inovator. Pada Tahun Anggaran 2025, penyerapan anggaran pada Bidang Inovasi dan Teknologi belum terealisasi secara maksimal akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kurang optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga menimbulkan utang pada pihak ke-3 (tiga) pada tahun berjalan. Kewajiban tersebut direncanakan untuk dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan mekanism.

Guna mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah maka perlu perbandingan dengan pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya, Maka sebagai bahan pembanding pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 35.440.370.187 ,- dengan perincian Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 15.906.159.749,- dan Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 19.534.210.438,- dari jumlah anggaran tersebut diatas dapat direalisasikan sebagai berikut :

- 1. Realisasi Fisik sebesar 100%
- 2. Realisasi Keuangan sebesar 90.39%

Sedangkan pada tahun anggaran 2025 anggaran murni sebesar Rp. 20.627.186.960,- kemudian pada APBD - Perubahan 2025 berkurang menjadi Rp. 17.957.346.099,- dengan perincian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 12.741.776.127,- dan Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 587.584.800,- dari jumlah anggaran tersebut diatas dapat direalisasikan sebagai berikut berikut :

- 1. Realisasi Fisik sebesar 100%
- 2. Realisasi Keuangan sebesar 90,57%

Tabel Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2024 dan 2025

No	Program	Tahun 2024				Tahun 2025			
		Jumlah Anggaran Rp.	Fisik %	Keu %	Ket.	Jumlah Anggaran Rp.	Fisik %	Keu %	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	15.906.159.749,-	100	90,52		12.741.776.127,-	100	91.46	
2.	Penelitian Dan Pengembangan	19.539.210,-	100	94,14		5.215.569.972,-	100	88.38	Hutang Pihak ke 3
	Jumlah	35.440.370.187,-	100	92,01		17.957.346.099,-	100	90.57	

Matrik Pencapaian Realisasi Kinerja Utama Tahun 2021-2026

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode (2025)
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah							
1.1	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100%	100%	0	100%
1.2	Indeks Inovasi Daerah	0	55.83	58.96	58,59	59,81	0	58,3

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025. Selain itu dapat dijadikan parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan. Laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Brida Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 telah melaksanakan 2 (dua) Program terdiri dari :

1. Program Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Tahun 2025, capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BRIDA) menunjukkan hasil yang sangat baik dan mencerminkan efektivitas pengelolaan program serta anggaran.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi fisik mencapai 100%, yang menunjukkan seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi keuangan mencapai 91,46%, yang mengindikasikan adanya efisiensi anggaran mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan.

Selanjutnya, pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, realisasi keuangan mencapai 88,38%, sedangkan capaian fisik menunjukkan angka 220%. Capaian fisik yang melampaui target ini menunjukkan bahwa BRIDA mampu menghasilkan output kegiatan yang jauh lebih tinggi dari target karena capaian di Bidang Inovasi dan Teknologi lebih dari target, meskipun didukung dengan realisasi anggaran yang tidak terserap secara maksimal. Hal ini mencerminkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian fisik dan realisasi keuangan pada kedua program tersebut menunjukkan bahwa BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan

berorientasi pada hasil. Tingginya capaian fisik, bahkan melampaui 200% pada program penelitian dan pengembangan, menjadi indikator kuat bahwa pelaksanaan program tidak hanya sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.

Dengan demikian, kinerja BRIDA Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025 dapat disimpulkan berada dalam kategori sangat baik, dengan tingkat efisiensi anggaran yang optimal serta capaian output yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Sebagai upaya peningkatan kinerja di masa mendatang, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (BRIDA) akan melakukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan guna memperkuat peran kelembagaan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.

1. BRIDA akan memperkuat perencanaan kinerja yang lebih terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, melalui penyelarasan program riset dengan isu-isu strategis daerah. Dengan demikian, setiap kegiatan penelitian dan pengembangan benar-benar memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berdampak langsung.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi prioritas, melalui penguatan kapasitas peneliti dan analis kebijakan, pelatihan metodologi riset, serta pengembangan kompetensi di bidang inovasi daerah. SDM yang kompeten akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas output dan daya saing inovasi.
3. BRIDA akan memperluas kolaborasi dan sinergi dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta sektor swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi hasil riset, mempercepat implementasi inovasi, dan menghindari duplikasi program.
4. Optimalisasi pemanfaatan anggaran akan terus dilakukan melalui penguatan pengendalian internal, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta penerapan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas hasil. Penggunaan anggaran akan diarahkan pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

5. BRIDA akan mengembangkan sistem dokumentasi dan diseminasi hasil riset secara lebih terbuka dan digital, sehingga hasil kajian dan inovasi dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemangku kepentingan.

Dengan langkah-langkah tersebut, BRIDA Kab. Kutai Kartanegara diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta semakin berperan strategis dalam menghasilkan kebijakan daerah yang inovatif, efektif, dan berbasis bukti.

Tanggapan, Saran dan masukan dari Perangkat Daerah penerima hasil rekomendasi sangat diharapkan sebagai masukan dan akan dijadikan sebagai umpan balik demi perbaikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kedepan.

Demikian Laporan ini dibuat dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah khususnya dan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara pada umumnya. Amin.



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung BAPPEDA-Brida Lt. 4
TENGGARONG